

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran**

##### **2.1.a Pengertian Pelanggaran**

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** pengertian pelanggaran adalah: “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut **Bambang Poernomo** mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>9</sup>

Mengenai pelanggaran menurut para ahli diatas, adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-

---

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

<sup>9</sup>Bambang Poernomo, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40

sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.<sup>10</sup> Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut **Memorie van Toelichting** (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipii), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.

Pandangan penulis mengemukakan bahwa perbedaan kedua istilah menurut **Memorie van Toelichting** tersebut mempunyai perbedaan ciri- ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang- undang pidana.

Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.

---

<sup>10</sup> Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, hlm, 86.

- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

#### 2.1.b Unsur-unsur Pelanggaran

Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaran yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum.

### 2.2 Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Polri

#### 2.2.a Pengertian Etika

Menurut **Brooks**, etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan – permasalahan di dunia nyata.<sup>11</sup>

Menurut **Bertens** mengemukakan bahwa Etika mempunyai beberapa makna yang merupakan peraturan yang menjadi pedoman untuk individu atau kumpulan dalam mengatur tingkah laku.

Menurut **Budi Susanto**, Etika adalah segala sesuatu yang menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang dimaksud diatas mengenai tentang pengertian etika pada umumnya, penulis mengemukakan pendapat bahwa etika merupakan norma atau nilai-nilai moral yang dimiliki seseorang yang mengatur tentang watak,

---

<sup>11</sup>Brooks, Leonard J. 2007. *Etika Bisnis & Profesi*, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat

<sup>12</sup>Kansil dan Christine, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. PRADNYA PARAMITA, Jakarta, hlm.1

tingkah laku, akhlak, perasaan serta kebiasaan yang dianggap baik dan buruk. Sehingga etika sangat dibutuhkan dan berpengaruh dalam menjalankan sebuah profesinya.

#### 2.2.b Tujuan Etika

Tujuan etika ialah mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh manusia dimanapun berada dan kapanpun mengenai penilaian baik buruk. Tujuan demikian banyak mengalami kendala sebab ukuran baik buruk itu sangat relatif. Etika menentukan ukuran atas tindakan manusia, oleh karena itu disebut ilmu pengetahuan normatif, dan norma yang dipergunakan adalah norma tentang baik dan buruk. Dalam setiap tindakan yang baik, selalu diharapkan pada yang ideal bahwa ada tindakan yang lebih ideal lagi dan seterusnya. Dalam mengusahakan tujuan etika, pada umumnya menjadikan norma yang ideal sebagai pola yang diharapkan.<sup>13</sup> Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nilai etika tidak hanya milik orang perseorangan atau segolongan orang saja, tetapi setiap orang atau setiap keluarga, setiap kelompok masyarakat sampai pada suatu bangsa mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### 2.2.c Pengertian Profesi

---

<sup>13</sup>Hasbullah Bakry, 1981, *Sistematika Filsafat*, Widjaja, Jakarta, hal 64

Menurut **Magnis Suseno** mendiskripsikan bahwa profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut **A.S. Hornby**, menjelaskan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau lembaga profesi, dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta memiliki kode etik.<sup>15</sup>

Menurut penulis berdasarkan penjelasan pengertian diatas menurut **Magnis Suseno** dan **A.S. Hornby**, bahwa profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari nafkah hidup yang mengandalkan kemampuan khusus sesuai bidang yang dikuasainya.

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Kansil dan Christine, *Op.Cit.* hlm. 6

<sup>15</sup>Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Replika Aditama, Jakarta, hlm.101.

<sup>16</sup>Hasbullah, Bakry, *Op.cit.* 1981.

Berdasarkan pandangan **De George** tentang pengertian profesi dan profesional sebagaimana diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa profesi terdiri dari kelompok terbatas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat pada umumnya, Antara lain adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, wartawan, hakim, pengacara, dan akuntan. Jika dilihat dari beberapa pandangan di atas mengenai pengertian profesi, penulis dapat mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang harus memiliki suatu kemahiran khusus maupun intelektual yang dilakukan secara bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Dan dalam melaksanakan profesi itu secara baik, dituntut adanya moralitas yang tinggi dari perilakunya.

Pengembangan profesi bergantung pada diri pribadi yang bersangkutan karena mereka secara pribadi mempunyai tanggungjawab penuh atas mutu pelayanan profesinya dan harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan, yang tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan terpercaya. Oleh karena itu, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan, untuk itu maka sifatnya tanpa pamrih sebagai ciri khusus dalam mengembangkan profesi.

#### 2.2.d Ciri-ciri Profesi

Pandangan **M. Jusuf Hanafiah** dan **Amri Amir** menyatakan bahwa pekerjaan profesi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional;
2. Pekerjaannya berlandaskan etik profesi;
3. Mengutamakan panggilan kemanusiaan dari pada keuntungan;
4. Pekerjaannya legal melalui perizinan;
5. Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat;
6. Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu profesi;

Mencermati ciri-ciri profesi sebagaimana diuraikan di atas oleh **M. Jusuf Hanafiah** dan **Amri Amir**, maka penulis menyimpulkan bahwasannya profesi adalah suatu pekerjaan yang mempunyai manfaat sosial karena diperlukan mengabdikan kepada masyarakat. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup> Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu dan disiplin intelektual masyarakat terpelajar. Dalam profesi juga ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Kode etik tersebut merupakan standar moral atau standar tingkah lakuyang dikenakan pada semua anggota profesi yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup>M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, E.G.C., Jakarta, hlm.32.

<sup>18</sup>Annisa Ratna Sari, 2015. Jurnal: *Moralitas Dan Profesionalisme Guru Dalam Kependidikan Di Indonesia*. Jurusan Pendidikan Akuntansi Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta.

Menurut **Satjipto Rahardjo** Profesi tidak hanya mengandung dimensi teknis dan keterampilan, melainkan juga moral dan filsafat. Setiap profesi cenderung memiliki 3 (tiga) ciri sebagai berikut ;<sup>19</sup>

1. Menggunakan serangkaian pengetahuan akademis, baik yang bersifat teori maupun terapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Lebih mengutamakan standar-standar teoritis dalam upayanya mengukur keberhasilan suatu profesi;
3. Memiliki system pengawasan terhadap praktek para pengemban profesi dengan menetapkan kode etik sebagai salah satu standar perilaku para pengemban profesi.

Berdasarkan pandangan **Satjipto Rahardjo** terkait profesi yang dijelaskan diatas, penulis berupaya menyimpulkan bahwa kewajiban profesi tidak identik dengan kewajiban hukum, juga tidak bertentangan satu sama lain. Dalam beberapa hal kewajiban profesi itu sama dengan kewajiban hukum, sehingga dapat terjadi setiap pelanggaran profesi ada sanksi hukum disamping sanksi profesi. Bedanya kewajiban profesi itu sering dianggap sebagai perangkat bimbingan etik (*ethical guidelines*), sehingga pelanggaran atas kewajiban profesi itu berada diluar jalur hukum. Namun demikian pelanggaran profesi yang tidak jelas sanksinya akan menghambat perkembangan profesi itu sendiri. Etika Profesi lebih mengatur pada praktek dilapangan kerjanya sehingga ada kekhususan sendiri pada seseorang yang terikat pada profesinya yang telah diatur didalam undang-undang kode etik profesi.

Etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Dalam hal

---

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 1.



ini para ilmuwan harus berorientasi pada rasa sadar akan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab sebagai ilmuwan yang melatarbelkangi corak pemikiran ilmiah dan sikap ilmiahnya.<sup>20</sup>

Menurut penulis dalam tinjauan tentang etika profesi yang terjadi dilapangan ialah pandangan atau sorotan masyarakat yang semakin tajam manakala perilaku anggota profesi tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang disepakati bersama, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat etik tersebut. Contohnya dalam profesi hukum ada mafia peradilan dan dalam profesi dokter ada pendirian klinik super spesialis di daerah mewah yang mustahil dapat dijangkau masyarakat umum.

#### 2.2.e. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.<sup>21</sup> Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

Penulis mengemukakan pandangan bahwa apabila salah satu anggota kelompok profesi itu berbuat yang menyimpang dari kode etik profesinya, maka

---

<sup>20</sup>Abbas Hamami, 1996, *Etika Keilmuan dalam Filsafat Ilmu*, Tim Dosen Filsafat Ilmu, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 176

<sup>21</sup>Pudi Rahardi, *Op.Cit*, Hlm. 156-157

kelompok tersebut akan berdampak negatif pada pandangan dari masyarakat, sehingga seharusnya kelompok profesi itu harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Menurut **Franz Magins Suseno** kode Etik Profesi juga diartikan sebagai norma-norma perilaku pemegang profesi yang dimiliki dua prinsip yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Sebuah profesi memiliki suatu kode etik profesi yang mana setiap profesi mensyaratkan adanya landasan moral dalam menjalankan profesinya.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut **Bertens**, menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut penulis dalam penjelasan tersebut diatas bahwa moral adalah sesuatu yang penting yang harus ada pada setiap pemegang profesi yang disandangnya, oleh karena itu pemegang profesi memiliki tanggung jawab moral dan komitmen atas profesi yang dijalankannya. Artinya dalam hal ini moral adalah sesuatu landasan dasar dalam menjalankan suatu profesi.

#### 2.2.f. Pengertian Kode Etik Profesi Polri

Di dalam Peraturan Kode Etik Profesi Polri No.14 Tahun 2011 Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa Kepolisian didalam Instansi Polri dari pangkat terendah sampai tertinggi didalam anggota Polri dalam menjalankan tugas, fungsi

---

<sup>22</sup>Franz Magins Suseno, 2006, *Etika Abadi Ke-20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm 35.

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2006, hlm 77.

dan wewenang kepolisian bertindak sesuai aturan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Kode etik profesi POLRI secara normatif telah diatur didalam pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya diatur dalam PERKAP No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi POLRI berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.<sup>24</sup>

Fungsi kode etik Profesi Polri adalah sebagai panutan dalam kepribadian anggota polri dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sesuai prinsip anggota polri. Selanjutnya agar tidak menyimpang dari presedur atau SOP (standart operasional prosedur) yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang sudah tertulis.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait Kode Etik Profesi Polri, maka penulis menyimpulkan bahwa Kode Etik Profesi Polri merupakan norma yang mengikat secara moral dan profesionalisme dalam suatu pekerjaan atau profesi tertentu, yang dimana dituangkan dalam sebuah aturan yang bersifat mengikat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan semua aturan ini, kepolisian memiliki peran yang sangat penting di masyarakat dan sangat dipercaya untuk menjaga serta melindungi keamanan Negara, namun tidak menutup kemungkinan bahwa

---

<sup>24</sup> *Ibid*

lembaga kepolisian juga tak lepas dari jeratan hukum untuk beberapa anggota kepolisian yang pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana, sehingga akibat dari perbuatan oknum polisi yang menyimpang adalah mencoreng nama baik lembaga kepolisian serta mengakibatkan pandangan yang buruk bagi masyarakat sekitar. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dikarenakan faktor-faktor tertentu semisal faktor kesempatan dan faktor lingkungan anggota Polri dan juga bisa terjadi pada pengaruh kepribadian keseharian anggota tersebut. Adanya kode etik profesi sekiranya mampu membatasi ruang lingkup anggota kepolisian dalam berbuat penyimpangan.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **2.3.a Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan hukum pidana bilamana seseorang melanggar.

Menurut Simons, apa yang dimaksudkan dengan *feit strafbaar* adalah tingkah laku (*handeling*) yang terancam dengan hukuman, yang bertentangan dengan hukum, yang berkaitan dengan kesilapan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, perbuatan pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan sebagai dilarang dan diancam oleh hukuman pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56.

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.37.

Seperti yang jelaskan oleh beberapa pendapat ahli di atas, penulis sepakat dengan pendapat **Simons**, menurut penulis semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang akan menjalani hukuman. Dalam hal ini bagi pihak polisi yang melakukan kejahatan, maka ia dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang berarti perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan yang ada dan dapat dikriminalisasi, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada Peradilan Umum.

Sedangkan menurut penulis, pendapat Barda Nawawi Arif lebih ditekankan kepada seseorang yang melakukan atau tidak melakukan kejahatan yang melanggar ketentuan hukum, dapat disetujui, artinya jika seseorang tidak melakukan tetapi memerintahkan seseorang atau kelompok melakukan kejahatan melanggar peruntukan undang-undang boleh dikenakan sanksi dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

### 2.3.b Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis, Pandangan monistik adalah pandangan yang melihat keperluan, kerana kewujudan seorang penjahat mesti memasukkan dua perkara, yaitu sifat dan tindakan.<sup>27</sup> Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahawa dalam arti perbuatan atau tindak pidana ia dimasukkan didalam tindakan yang dilarang dan liabiliti atau kesalahan

---

<sup>27</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia*, Yogyakarta, hlm.38

Adapun unsur-unsur perbuatan pidana menurut pandangan monistik termasuk:<sup>28</sup>

- a. Terdapat perbuatan;
- b. Terdapat sifat yang menyalahi undang-undang;
- c. Tidak ada justifikasi;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pengampunan;

Lain halnya dengan pandangan dualistik yang memisahkan antara tindakan pidana dan tanggungjawab pidana. Pandangan ini mempunyai prinsip bahawa dalam suatu tindakan jenayah hanya termasuk perbuatan jenayah, dan tindak balas jenayah tidak menjadi unsur perbuatan pidana. Oleh itu, untuk menyatakan sesuatu tindakan sebagai suatu tindakan pidana adalah mencukupi dengan kewujudan suatu tindakan yang dirumuskan oleh undang-undang yang mempunyai sifat bertentangan dengan hukum tanpa adanya justifikasi.

Menurut pandangan dualistik, unsur-unsur kesalahan pidana termasuk:

- a. Terdapat perbuatan yang sepadan dengan formula kesalahan;
- b. Terdapat sifat yang menyalahi undang-undang;
- c. Tidak ada justifikasi;

Menurut peruntukan tindakan pidana mengikut pandangan dualistik dan unsur-unsur tanggungjawab pidana, penulis menyimpulkan bahawa seseorang boleh dikenakan pidana jika dia telah memenuhi 3 (tiga) unsur pidana itu sendiri dan kebertanggungjawaban, tetapi jika seseorang tidak memenuhi 3 elemen salah satu unsur yang telah dijelaskan dari pandangan dualistik dan tanggungjawab pidana, seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman sampai keputusan seorang hakim

---

<sup>28</sup> Amir Ilyas, *Ibid.* Hal.43

yang bersifat *incracht*. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan lain dari beberapa pakar mengenai unsur-unsur perbuatan pidana, termasuk pidana subjektif dan objektif.

Sebagaimana yang dimaksud, penulis mengambil inti penjelasan pendapat di atas, yaitu kita tahu bahwa perbuatan pidana adalah salah dan terancam dengan hukuman pidana, penjatuan pidana terhadap pelaku adalah untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum dan memberikan kesan penebusan untuk setiap punca yang terkandung dalam Akta Undang-undang pidana secara umum kita dapat menerangkannya ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya kita boleh dibahagikan kepada dua jenis unsur yaitu: unsur-unsur Subjektif dan elemen Objektif. Unsur-unsur subjek adalah unsur-unsur yang wujud dalam orang yang terlibat atau yang berkaitan dengan orang pelaku, dan termasuk yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan elemen objektif adalah elemen yang berkaitan dengan keadaan, yakni dalam keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **2.4.a Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Istilah Polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” dikenal dalam Bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*”, digunakan sebagai *tittle* buku pertama Plato, Yakni “*politeia*” yang mengandung makna suatu Negara yang ideal sesuai

dengan cita-citanya, yang bebas dari pemimpin Negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Polri, “Kepolisian adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.<sup>30</sup>

Pendapat beberapa ahli tentang pengertian polisi :

Menurut **Van Vollenhoven** dalam bukunya “*Politie Overzee*” istilah “*Politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>31</sup>

Menurut **Pudi Rahardi** dalam bukunya Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) mengatakan bahwa Polri merupakan institusi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good govermance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat **Van Vollenhoven** dan **Pudi Rahardi**, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anggota kepolisian dapat dimasukan ke dalam unsur

---

<sup>29</sup>Azhari dalam Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 2.

<sup>30</sup>Azhari dalam Sadjijono, *Ibid*

<sup>31</sup> Azhari dalam Sadjijono, *Ibid*

<sup>32</sup> Pudi Rahardi, *Op.cit.* hlm.6.



pemerintahan dalam arti luas, yaitu badan pelaksana, badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Artinya badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian yang bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman dalam penyelenggaraan kepentingan umum.

Kepolisian merupakan aparatur pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur yang memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>33</sup>

Menurut penulis, hadirnya Lembaga Kepolisian di Indonesia sangatlah berperan penting untuk menjaga keseimbangan dimasyarakat dan menekan tingkat kejahatan ataupun kriminal yang terjadi sewaktu-waktu.

Tugas Kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op.Cit.*

mereka yang melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas-tugas pokok Anggota Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya fungsi dan tujuan terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia itu tertera didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi bahwasannya:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka sudah tertera jelas tugas dan fungsi bahwasanya kepolisian dengan ini melindungi masyarakat disetiap wilayah hukumnya untuk terjaganya ketentraman dan ketertiban umum sehingga nantinya tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun kejahatan ataupun tindak pidana dilingkungan masyarakat berupa kekerasan.

#### 2.4.b Dasar Hukum, Tugas Dan Kewenangan POLRI

Adapun Dasar hukum bagi POLRI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>34</sup>Undang-undang No.2 Tahun 2002, Ibid.

Dalam teori hukum acara pidana, ada 4(empat) tahapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan Tindak Pidana antara lain :

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan
- d. Pelaksanaan Putusan Hakim

